

## PERILAKU PEMILIH GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT TAHUN 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Cobleng Kota Bandung)

**Tatik Rohmawati**

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

### Abstrak

Penelitian ini mempunyai fokus tentang perilaku pemilih golput dalam pilgub Jawa Barat. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cobleng adalah wilayah perkotaan yang tingkat golputnya cukup signifikan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Adapun metode pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok golput yang terjadi di Kecamatan Cobleng didominasi oleh para kaum intelektual yang mempunyai pendidikan cukup dan berpikir idealis. Makna golput yang ditemukan di Kecamatan Cobleng adalah mereka yang dengan sengaja tidak menggunakan hak pilih dan dapat dilihat dari surat suara yang tidak sah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih golput di Kecamatan Cobleng dapat dilihat dari faktor teknis yang berasal dari pemilih, sikap apatis dan kurangnya sosialisasi Pilgub Jawa Barat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang menjadi kelompok golput di Kecamatan Cobleng adalah para pendatang seperti mahasiswa dan pedagang. Makna golput yang terjadi di Kecamatan Cobleng adalah sekelompok orang yang tidak memberikan aspirasi kepada ketiga kandidat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku pemilih golput di Kecamatan Cobleng dalam pilgub Jabar 2008 adalah faktor teknis seperti administratif dan sikap politis serta sosialisasi Pilgub Jawa Barat yang kurang maksimal.

Kata Kunci : Perilaku Pemilih, Golput, Pemilihan Gubernur, Demokrasi Lokal.

### Abstract

*This research focuses in the attitude of the white group voter in the governor election in west Java. The problem which happened in Cobleng subdistrict is city area that the level of the white group is enough significant. The research method uses qualitative method. The researcher acts as the research instrument. Data collecting method include observation, interview and documentary study. The result of the research points that the white group that happened in Cobleng subdistrict is dominated by intellectual groups whose enough education and think idealist means the white group found in Cobleng subdistrict is they are expressly not to use elected right and it can be see from voice letter which illegal. The elements that influence the attitude of the white group voter in Cobleng subdistrict can be seen from the voters, apathetic attitude and lack of socialization in the governor election in west Java. The conclusion of this research is being the white group in Cobleng subdistrict is the comers such as university students and traders. Means of the white group which happened in Cobleng subdistrict is a group of person who does not give aspiration to the third of candidate. The elements that influence of the improvement of the attitude of the white group voter in Cobleng subdistrict in the governor election in west Java in 2008 is element of technical such as administrative, politic attitude and the governor election socialization in west Java that less maximal.*

*Key words : The attitude of the voter, the white group, the governor election, local democracy*

### 1. Pendahuluan

Pemilu/pilkada langsung merupakan manifestasi dari demokrasi yang sesungguhnya, karena kedaulatan sudah sepenuhnya kembali ke tangan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan akhirnya rakyat bebas untuk menjatuhkan pilihannya. Apabila masyarakat tidak mau berpartisipasi/

menggunakan hak pilihnya, tentu ada alasan tersendiri.

Salah satu gejala penting dari Pilkada hingga saat ini adalah tingginya angka pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan atau bisa dikatakan sebagai golput. Dalam pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah, menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang

berlangsung sejak tahun 2005 hingga 2008, terdapat 13 Pemilu gubernur justru dimenangkan oleh golput atau golongan putih antara lain Pilkada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Putaran I, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara<sup>1</sup>. Artinya bahwa jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal ini sesuai dengan yang terjadi dalam Pilkada Jawa Barat. Meskipun Ahmad Heryawan-Dede Yusuf berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan kandidat lain, yaitu dengan perolehan 7.287.647 suara, jumlah golput jauh lebih besar mencapai 9.130.594 suara<sup>2</sup>.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2008 kemaren, merupakan pemilihan yang pertama dilakukan secara langsung oleh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih diberikan hak untuk memberikan suara. Peristiwa tersebut diikuti masyarakat Jawa Barat dengan jumlah pemilih sebesar 27.972.924 pemilih dengan total 63.005 TPS (Tempat Pemungutan Suara)<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pilgub Jawa Barat diselenggarakan pada tanggal 8 April 2008. Waktu pemilihan tersebut diliburkan, sehingga masyarakat dapat memberikan suara. Namun, dalam kenyataannya walaupun waktu pemilihan sudah diliburkan masih ada masyarakat Jawa Barat yang tidak memberikan suara dalam pemilihan tersebut.

<sup>1</sup> Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie. *Fenomena Golput*. Al-Wa'ie No 97 Tahun IX, 1-30 September 2008. hal 10

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Jurnal nasional dalam Bandung New. DPT dan TPS Pilgub Jabar 2008 Disahkan Tanggal 1 Maret 2008. Melalui

<http://argusbandung.blogspot.com/2008/03/dpt-dantps-pilgub-jabar-2008-disahkan.html>. {10/12/2009}.

Hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih memilih golput. Berbagai penjelasan mengenai golput hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang lebih mendalam.

Fenomena di atas membuat Penulis mencoba mencari penjelasan yang lebih cocok untuk konteks kasus Pilgub di Jawa Barat khususnya yang terjadi di Kecamatan Coblong. Disamping itu, belum ada studi yang mendalam mengenai alasan dan pilihan seseorang untuk golput.

Alasan dipilihnya Kecamatan Coblong sebagai *case* dalam penelitian tesis ini sebagai berikut: *Pertama*, Kecamatan Coblong merupakan salah satu daerah yang tingkat golputnya cukup tinggi. *Kedua*, Coblong merupakan tempat yang strategis, berada di pusat perkotaan. *Ketiga*, cukup banyak terdapat kaum intelektual dalam hal ini kaum elit, yang dapat dilihat dari berbagai latar belakang pendidikan di tempat tersebut. *Keempat*, Coblong merupakan kecamatan yang mempunyai potensi yang cukup baik dan mempunyai status sosial serta mata pencaharian yang beragam, dimana cukup banyak terdapat Masjid dan Musholla.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka Penulis mengambil judul tentang "Perilaku Pemilih Golput Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008 (Studi Kasus di Kecamatan Coblong Kota Bandung)".

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Siapa saja yang termasuk kelompok golput di Kecamatan Coblong dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008?
- 2) Bagaimana makna golput di Kecamatan Coblong dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008?
- 3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan perilaku pemilih golput di Kecamatan Coblong dalam pemilihan

Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008?

## 2. Kajian Pustaka

Konsep *demokrasi* secara umum mengartikan bahwa pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ide dasar demokrasi mensyaratkan keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. Demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru hampir selalu dibicarakan secara berkaitan dengan pembentukan sistem politik yang mencerminkan prinsip keterwakilan, partisipasi, dan kontrol. Asumsi tentang pemerintahan yang demokratis mengartikan pemisahan kekuasaan dalam tiga wilayah institusi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Secara umum prinsip-prinsip demokrasi meliputi adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, adanya beberapa partai politik, adanya konsensus, adanya persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan tentang administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintahan yang mayoritas, persaingan keahlian, mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara dan pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Menurut Pradanawati (Pradanawati, 2005:10), secara umum gelombang demokratisasi di Indonesia setelah memasuki era reformasi nampak mulai mengalami kemajuan dengan terdapatnya tanda-tanda yaitu adanya kebebasan mengemukakan pendapat, pembatasan atas kekuasaan, pemilihan umum serta pemilihan jabatan-jabatan publik yang kompetitif termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Pengakuan terhadap negara Indonesia yang mulai demokratis ditunjukkan pula oleh pendapat Richard Borsuk (dalam Fukuyama 2005: 93) bahwa di Indonesia digantinya rezim

otoriter Suharto dengan rezim yang demokratis mengakibatkan munculnya berbagai perubahan dalam Undang-Undang Dasar yang mendelegasikan otoritas yang lebih besar pada pemerintah provinsi dan daerah.

Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk adanya demokrasi lokal. Pada awalnya, pilkada langsung dilaksanakan dengan suatu keyakinan kuat baik dari para akademisi maupun politisi bahwa agenda demokratisasi di negeri ini harus didorong oleh demokratisasi di tingkat lokal. Faktanya, Pilkada secara langsung adalah jawaban dari kebutuhan untuk mempercepat demokratisasi di tingkat lokal. Pemerintah di daerah beserta dengan aktor-aktor politik lainnya memiliki peran yang sangat penting untuk akselerasi demokrasi di daerah. Peningkatan kualitas demokrasi di daerah, dianggap akan turut mendorong kemajuan demokratisasi di tingkat nasional. Menurut Smith (1998: 85-92) ada sejumlah alasan mengenai pentingnya mendorong demokratisasi di tingkat lokal, antara lain ;

- (1) Demokrasi lokal adalah wahana yang paling dekat bagi warga dalam konteks pendidikan politik.
- (2) Pemerintah daerah merupakan aktor penting yang dapat memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah pusat.
- (3) Tingkat partisipasi politik di daerah kerap kali lebih baik secara kualitatif dan kuantitatif jika dibandingkan dengan tingkat nasional.
- (4) Kinerja dan prestasi pemerintahan di tingkat lokal akan sangat memperkuat legitimasi dan kredibilitas politik dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pendidikan politik sangat diperlukan untuk mendewasakan masyarakat, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini termasuk pemberdayaan organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan. Upaya pemberdayaan ini harus berlangsung simultan untuk memantapkan tatanan demokrasi yang ada, agar tidak

mengejar formalitas demokrasi tetapi kehilangan substansinya.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan mampu membawa iklim demokrasi kearah yang lebih baik jika mampu dikelola dengan benar, dan diharapkan setelah pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat dilaksanakan maka akan mampu memberikan efek bagi perkembangan demokrasi menjadi lebih berkualitas, sebab kondisi awal yang mendukung peningkatan demokrasi mulai terbentuk seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa untuk mewujudkan demokrasi dibutuhkan kondisi awal yang memadai untuk mendukung perkembangannya, yaitu:

- (1) Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala.
- (2) Kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
- (3) Adanya kemudahan akses untuk memperoleh sumber – sumber informasi dan alternatifnya.
- (4) Adanya otonomi asosiasional.
- (5) Dibangunnya pemerintahan perwakilan.
- (6) Terdapatnya hak warga negara yang inklusif.

(dalam Agustino, 2005 : 14)

Pelaksanaan Pemilu secara langsung, dalam implementasinya rakyat dituntut untuk mampu berpikir kritis, arif, cerdas terhadap tawaran yang diberikan oleh para calon Kepala Daerah, serta menentukan siapakah yang pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Melihat kondisi ini maka perekrutan bagi para calon Kepala daerah dirasakan sebagai sebuah proses yang penting karena turut pula menentukan apakah calon yang direkrut ini memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapat dukungan luas dari masyarakat, oleh karena itu partai politik harus berhati-hati dalam mengajukan tokoh yang akan dijadikan sebagai calon Kepala Daerah, mengingat partai politik yang mengajukan tidak hanya satu maka dibutuhkan aturan main yang jelas, adil dan tidak memihak oleh lembaga atau komisi yang netral yang

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung.

Ada berbagai bentuk pemilihan sebagai proses dan praktek dari konsep demokrasi. Sistem pemilihan kepala daerah langsung yang digunakan Indonesia saat ini secara teoritis dapat dikatakan sebagai bagian dari Pemilu. Menurut Prihatmoko (2005 : 109) : Pilkada langsung dapat dikatakan sebagai pemilu karena pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah yang memiliki dua prasyarat dasar, yaitu (1) rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang didukungnya; dan (2) calon-calon bersaing dalam satu medan permainan dengan aturan main yang sama.

Secara normatif, pilkada langsung mempunyai peranan yang besar dalam upaya untuk mendorong pendalaman demokrasi di tingkat lokal. Secara prosedur sistem pemilihan langsung lebih menjamin keterlibatan masyarakat, ketimbang sistem perwakilan yang didominasi DPRD yang mengandalkan formalisme semata dan rawan terhadap bentuk-bentuk penyelewengan. Menurut Afifi (2005: 70), peranan Pilkada dalam demokrasi di tingkat lokal sebagai berikut:

- (1) Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal.
- (2) Pilkada langsung memungkinkan munculnya kandidat-kandidat yang lebih beragam dalam suatu kompetisi yang lebih terbuka.
- (3) Warga Negara memiliki posisi yang setara dalam mengaktualisasikan hak-hak politiknya tanpa harus menyinggung pada kepentingan-kepentingan elit politik.
- (4) Pilkada langsung memungkinkan munculnya pemimpin yang aspiratif, handal dan memiliki basis legitimasi dalam masyarakat.

(5) Basis legitimasi yang kuat melalui pilkada, kepala daerah sama-sama mengklaim mandat dari masyarakat sehingga muncul pertimbangan kekuatan.

Pandangan di atas, bukan berarti menganggap bahwa sistem perwakilan merupakan sistem yang sama sekali tidak demokratis. Namun demikian, peranan pilkada dalam mendorong demokrasi tidak berhenti sampai di situ. Terlalu menekankan pada prosedur formal pemilihan akan menjebak Pilkada dalam perangkap formal. Dampak dari perangkap formal prosedural hanya akan menghasilkan demokrasi semu yang akan menjadi tempat bersemayamnya otoritarianisme dan oligarkisme baru.

Keberhasilan pilkada bisa dilihat dari sejauh mana proses pilkada secara kualitatif mendorong demokratisasi di tingkat lokal. Pada tataran prosedur, pilkada dihadang oleh serangkaian masalah yang tidak kurang akan menghambat tercapainya tujuan demokrasi lokal. Salah satunya adalah persoalan partisipasi. Partisipasi dalam pilkada akan mendorong peningkatan kualitas demokrasi lokal apabila ada kesadaran kritis dari masyarakat untuk menggunakan hak-haknya. Persoalan yang mendesak dari segi partisipasi ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada partai politik dan calon kepala daerah.

Menurut Seymour Martin Lipset dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Political Man: The Social Bases of Politics* seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (1998 : 10), mengemukakan bahwa variabel yang dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku memilih seseorang adalah pendapatan (*income*), pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status dan organisasi.

Seerti yang dikutip dari buku *Javanese Voters (A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System)* karya Afan Gaffar, James Protho berpendapat bahwa : *The sociological approach assumes that political*

*party preference, as well as voting preference, is the product of socio-economic characteristics like occupation, class, religion and ideology* (dalam Gaffar, 1992: 5)

Menurut James Protho preferensi memilih kepada partai dan dalam pemilihan umum adalah produk dari karakter sosial ekonomi masyarakat, seperti pekerjaan, kelas, agama dan ideologi (dalam Gaffar, 1992: 5).

Imawan<sup>4</sup> mengemukakan bahwa kelemahan utama dari model sosiologi adalah kenyataan bahwa memilih merupakan satu tindakan individual. Bukan satu tindakan kolektif. Dapat saja seseorang dijejali dengan norma-norma sosial yang berlaku. Tetapi tidak ada jaminan bahwa pada saat seseorang menentukan pilihan, dia tidak akan menyimpang dari norma yang dimilikinya. Dengan kata lain, selalu ada kemungkinan bahwa seseorang akan bertindak menyimpang dari norma-norma atau keyakinan kelompoknya.

Istilah “golput” (kependekan dari golongan putih) merupakan peristiwa yang fenomenal. Golput sendiri muncul tahun 1971 yang diperkenalkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi (seperti Arief Budiman) yang menolak terlibat dalam Pemilu di masa Orde Baru. Saat itu, Pemilu dilihat sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Warga negara yang mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Seseorang menggunakan hak pilihnya lebih karena kewajiban atau keterpaksaan daripada pencerminan dari sikap atau pilihan politik. Aktivis tersebut tidak setuju dengan penyelenggaraan Pemilu dan termasuk partai-

<sup>4</sup> Imawan, Riswandha. 1993. *Analisis Hasil Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*. Laporan Penelitian. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. Hal 23.

partai yang ikut berkompetisi, dan memperkenalkan golput untuk mengajak agar masyarakat tidak ikut memilih. Golput karena itu lebih merupakan sikap atau pilihan politik yang diambil secara sengaja. Saat ini istilah “golput” kemungkinan mengalami perubahan. Oleh karena itu, warga negara berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Tidak ada sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kecuali adanya ancaman pidana pada mereka yang dengan sengaja menganjurkan untuk tidak memilih.

Lebih lanjut, Miriam Budiardjo mendefinisikan golput adalah orang yang secara sadar tidak memakai hak pilihnya karena berpendapat bahwa pemilu seperti yang kita laksanakan dewasa ini tidak relevan, Jadi mereka termasuk kelompok orang yang tidak ke TPS (Miriam Budiardjo, 1994: 265).

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti golput merupakan sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Sikap tidak memilih dianggap sebagai satu pilihan. Hal ini terjadi, disebabkan adanya kekecewaan atau ketidakpercayaan dalam pemilu.

### 3. Metode

Penulis menggunakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif, yaitu studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus yang merupakan salah satu bentuk penelitian empiris yang melakukan investigasi terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan yang nyata khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak mempunyai pembuktian yang jelas<sup>5</sup>

Lebih lanjut Schramm dalam Yin menjelaskan bahwa inti studi kasus yaitu kecenderungan utama diantara semua ragam studi kasus adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya (Dalam salim, 1988: 93).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Secara operasional, tehnik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model tehnik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992: 15-20).

*Pertama*, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan tehnik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data sudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar informan yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari tokoh-tokoh dalam struktur keorganisasian kecamatan disilangkan dengan informasi yang diperoleh dari kaum intelektual di Kecamatan Coblong dan Ketua KPUD Jawa Barat serta Ketua KPUD Kota Bandung.

*Kedua*, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian, data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan perilaku pemilih golput dalam Pilgub Jawa Barat studi kasus di Kecamatan Coblong.

<sup>5</sup> Yin, Robert. 1994. *Case Study Research: Design and Method, second edition, Applied Social Research Methods Series Volume 5*, Sage Publications. London. hal. 13.

*Ketiga*, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum (general).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

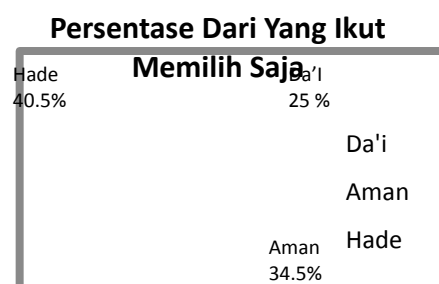
Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Salah satu wujud demokrasi lokal adalah adanya pemilihan Gubernur Jawa Barat. Pilgub Jabar dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 April 2008. Pemilihan tersebut merupakan pemilihan secara langsung pertama kali dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Barat. Tanggal yang ditetapkan untuk pelaksanaan Pilgub Jawa Barat diliburkan. Ini merupakan salah satu sebab adanya perilaku golput. Pada saat hari pencoblosan diliburkan, sehingga tidak ada aktifitas lain kecuali untuk datang ke tempat pemungutan suara. Akan tetapi, waktu yang diliburkan tersebut, mendorong pemilih untuk bepergian atau melaksanakan aktifitas ke luar kota, sehingga hal ini menjadi peluang terbukanya perilaku golput.

Jumlah pemilih dalam Pilgub Jawa Barat sebagaimana yang dilaporkan oleh KPUD Jabar, dalam hal ini ketua KPU sendiri yang menyampaikan berjumlah 28 juta orang<sup>6</sup>. Hade (Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf) memperoleh 7,3 juta suara (40,5%), Aman (Agum Gumelar dan Nu'man Abdul hakim) sebanyak 6,2 juta suara (34,5%) dan Da'I

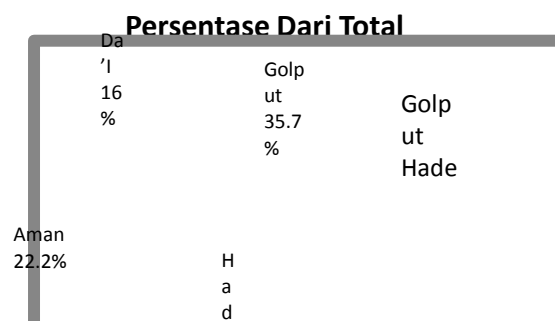
(Danny Setiawan dan Iwan Ridwan Sulandjana) memperoleh 4,5 juta suara (25,0%) Berarti ada sekitar 10 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Apabila persentasi tersebut dihitung berdasarkan total pemilih (28 juta), maka golput 35,7%, Hade 26%, Aman 22,2% dan Da'I 16%. Lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

**Gambar 1**



Sumber : Hizbut Tahrir, 2008 Melalui <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/fenomena-golput-dalam-pilkada>. (8 Agustus 2009)

**Gambar 2**



Sumber : Hizbut Tahrir, 2008 Melalui <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/fenomena-golput-dalam-pilkada>. (8 Agustus 2009)

Sedangkan jumlah pemilih untuk Kota Bandung sebanyak 1.574.332 pemilih dan terbagi kedalam 3.838 TPS. Khusus Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan masyarakat Cobleng sebagian besar termasuk golput. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa kelompok golput yang terjadi dalam Pilgub Jabar adalah kaum

<sup>6</sup> Wawancara dilaksanakan di kantor KPU Jawa Barat hari Sabtu 6 Februari 2010 pukul 09.30 Wib

<sup>7</sup> Ibid 7

intelektual, dimana yang mempunyai pendidikan cukup tinggi. Setelah melihat fakta di lapangan, ternyata di Kecamatan Cobleng terdapat cukup banyak masyarakat yang berpendidikan. baik S1, S2 maupun S3.

Golput sebagian besar diperankan oleh masyarakat kota. Alasannya *Pertama*, penduduk kota umumnya tingkat mobilitasnya tinggi sehingga mengganggu kerapian administrasi kependudukan. Data kependudukan di Kecamatan Cobleng masih cukup semrawut, ini terlihat dari cara mendata penduduknya, dimana masih ditemukan data sudah meninggal tetapi masih tercantum. Di sisi lain, masih ada keluhan dari masyarakat Cobleng yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih. *Kedua*, penduduk perkotaan umumnya lebih kritis karena lebih terpelajar. Kecamatan Cobleng terletak di pusat kota yang mempunyai potensi cukup signifikan. Di mana masyarakat Kecamatan Cobleng cukup dominan dalam memperoleh informasi akurat tentang politik lokal. Adanya realita ini menunjukkan bahwa golput cukup tinggi di Kecamatan Cobleng. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kaum intelektual seperti kalangan mahasiswa yang mempunyai cara berpikir idealis.

Secara garis besar bahwa yang menjadi golput mempunyai variasi profesi, ada yang dari mahasiswa, guru, dosen, pedagang dan pembantu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Ketua PPK Kecamatan Cobleng<sup>8</sup> bahwa kelompok yang menjadi golput di Kecamatan Cobleng adalah orang-orang pendatang, seperti mahasiswa yang kuliah di PTN maupun PTS di lingkungan Kecamatan Cobleng dan para pedagang kaki lima yang berada di lingkungan Kecamatan Cobleng.

Mahasiswa merupakan kaum yang terpelajar, kritis dan cukup idealis. Artinya mahasiswa memiliki pertimbangan tertentu untuk tidak mengikuti pemilihan. Sedangkan para pedagang lebih bersikap untuk memikirkan kehidupan sehari-harinya daripada memberikan suara untuk pasangan tertentu dalam Pilgub Jawa Barat. Informasi ini diperoleh berdasarkan *interview* dengan beberapa kalangan mahasiswa dan pedagang.

Kalangan mahasiswa yang terpelajar, umumnya lebih bersikap kritis. Secara singkat, menurut mahasiswa yang memiliki bekal pendidikan cukup<sup>9</sup> bahwa “golput merupakan bentuk partisipasi juga, karena tidak memilih termasuk hak bukan merupakan kewajiban”. Selain itu, katanya “ada beberapa kalangan mahasiswa yang tidak mencoblos, karena tidak mendapat kartu pemilih”. Hal ini mengakibatkan sikap tidak antusias untuk mengikuti Pilgub Jawa Barat. Alasan karena tidak mendapat kartu pemilih tersebut menurut peneliti merupakan salah satu bentuk ketidakprofesionalan dan kelalaian di lapangan dari petugas pendaftaran pemilih dan petugas verifikasi data pemilih yang kurang meninjau kembali data daftar pemilih tetap. Penyebab lainnya karena tidak terdaftar sebagai penduduk di kelurahan alias belum mempunyai KTP.

Sedangkan menurut Sekretaris Panwas Pilgub Jabar<sup>10</sup> bahwa kelompok golput yang terjadi di Kecamatan Cobleng berasal dari kalangan intelektual seperti mahasiswa yang bersikap idealis dan dari kaum pendatang. Kaum pendatang yang dimaksud adalah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan dan berasal dari berbagai luar kota. Pada saat pelaksanaan pemilihan memang diliburkan,

<sup>8</sup> Wawancara dilaksanakan di kediaman rumah Ketua PPK Kecamatan Cobleng hari Kamis 11 Februari 2010 pukul 13.30 Wib

<sup>9</sup> Wawancara dilaksanakan di salah satu kampus Perguruan Tinggi Swasta hari Senin 15 Februari 2010 pukul 09.00 Wib

<sup>10</sup> Wawancara dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cobleng hari Kamis 18 Februari 2010 pukul 11.10 Wib



sehingga bagi mahasiswa merupakan waktu yang tepat untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Akibat tersebut mereka yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak dilaksanakan. Hal inilah yang akhirnya memicu adanya kelompok golput yang berasal dari mahasiswa.

Senada yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa itu sendiri bahwa “mereka masih menganggap bahwa golput merupakan suatu pilihan yang sah-sah saja dan merupakan satu bentuk demokrasi”<sup>11</sup>. Demokrasi yang dianggap sebagai area kebebasan untuk menentukan satu sikap atau pilihan dalam Pilgub Jabar. Tentunya dari sikap tersebut patut untuk dihormati dan dihargai.

Berdasarkan pengamatan Penulis bahwa kaum golput atau kelompok golput adalah mereka yang mempunyai sikap politik bahwa tidak memilih sebagai satu pilihan. Ciri-ciri perilaku kelompok golput antara lain :

- (1) Sengaja tidak datang ke TPS, artinya pemilih dengan sengaja tidak datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Alasan tidak datang ke TPS disebabkan kesibukan pemilih yang tidak sempat (keluar kota) dan ketidakpercayaan terhadap calon kandidat.
- (2) Datang ke TPS tetapi tidak masuk bilik, artinya hanya datang untuk memenuhi undangan ke TPS tetapi tidak masuk bilik untuk melakukan pencoblosan.

Sedangkan bagi pemilih golput yang datang ke TPS dan masuk bilik (yang menggunakan hak pilihnya), dapat diklasifikasikan berdasarkan suara sah dan suara tidak sah. Suara tidak sah dapat disebabkan :

- (1) Pemilih salah memilih karena tidak tahu bagaimana cara memilih yang benar. Artinya pilihan coblosan terjadi di luar gambar kandidat yang akhirnya

menyebabkan kertas suara tidak sah dan tidak terhitung.

- (2) Dengan sengaja mencoblos nama saja atau lebih dari satu pasang calon.
- (3) Merusak surat suara. Artinya kertas suara ada yang tersobek.
- (4) Masuk bilik tetapi tidak mencoblos (blangko kosong). Artinya pemilih tetap masuk ke bilik pemilihan akan tetapi tidak melakukan pencoblosan dan kertas suara yang diberikan panitia tetap dimasukkan ke dalam kotak suara.

Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak bersedia memilih dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Tidak satupun partai politik peserta pemilu disukai oleh pemilih tersebut. Kedua, alasan mencari nafkah pada saat hari pemilihan. Ketiga, Pemilu dianggap tidak ada manfaatnya atau dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Terhadap persoalan ini penyelenggara pilgub dapat bersifat proaktif dengan melakukan sosialisasi dan penataan manajemen pilgub, sosialisasi dapat berupa melaksanakan program pendidikan politik untuk penyadaran masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan pilgub dalam rangka implementasi hak berdemokrasi. Bagi parpol persoalan ini dapat diatasi melalui program pencitraan dengan melakukan pendekatan media, dialog maupun penggalangan *door to door*.

Berikut rincian data Kecamatan Cobleng berdasarkan jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pilgub Jawa Barat dapat dilihat seperti tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara**  
**Pilgub Jawa Barat untuk Kecamatan Cobleng**

No	Uraian	Jumlah
1	Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS	55.956
2	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	22.817
3	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah provinsi	1.256

<sup>11</sup> Diskusi yang dilaksanakan di Kelas pada proses belajar mengajar membahas Pemilihan Ketua Sema Unikom, hari Selasa 13 Desember 2011 Pukul 10.30 Wib.

4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos	322
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	24.385
6	Jumlah surat suara yang terpakai	56.931
7	Jumlah seluruh PPS	6

Sumber : Rekapitulasi Pilgub Kecamatan Cobleng, 2008.

Tabel di atas menunjukkan bahwa golput, dalam hal ini dilihat dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos cukup tinggi yaitu 23.139 atau 41% dari jumlah pemilih. Angka ini membuktikan bahwa di Kecamatan Cobleng, golput cukup tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Panwas Pilgub Jawa Barat dan staf pelaksana Pilgub Jabar<sup>12</sup>, suara tidak sah juga dapat dilihat dari blanko kosong, artinya mereka tetap melakukan pemilihan datang ke TPS, tetapi tidak memilih atau mencoblos salah satu kandidat.

Dari uraian di atas jelas bahwa kelompok golput yang terdapat di Kecamatan Cobleng berasal dari kalangan para pendatang yaitu kalangan mahasiswa dan para pedagang. Hal ini dapat dilihat bahwa Kecamatan Cobleng merupakan tempat yang strategis untuk menarik para pedagang dalam mencari nafkah. Selain itu, Kecamatan Cobleng merupakan wilayah yang cukup signifikan dari beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, sehingga jumlah mahasiswa yang tinggal (kos) di wilayah tersebut cukup banyak.

Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena jumlah golput dari masa ke masa<sup>13</sup>. *Pertama*, peningkatan jumlah golput terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol. Parpol dianggap hanya berorientasi pada kekuasaan dibanding memperjuangkan

kepentingan masyarakat. *Kedua*, golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat. Golput lebih banyak karena persoalan administratif, seperti tidak terdaftar atau jumlah suara yang tidak sah.

Golput yang dimaksud memang ada dua yaitu golput administratif dan ideologis. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan politis, sedangkan golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat<sup>14</sup> bahwa makna golput secara umum yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat adalah dari suara tidak sah dan yang tidak menggunakan hak pilih.

Jumlah suara tidak sah untuk hasil Pilgub Jawa Barat prosentasenya 4,29%. Dari hasil pemantauan bahwa tidak sahnya surat suara tersebut sebagian besar karena pasangan calon yang dicoblos dalam surat suara lebih dari pada satu. Hal ini menunjukkan bahwa bukan karena si pemilih tidak paham tata cara mencoblos tetapi lebih disebabkan oleh faktor kesengajaan agar pemilih tersebut oleh masyarakat sekitarnya tidak disebut orang tidak berpartisipasi, tetapi ia tidak mempunyai pilihan siapa yang akan dipilih. Hal ini diperkuat dengan opini beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa<sup>15</sup> “pada saat pelaksanaan pemilihan memang datang ke TPS, tetapi setelah masuk ke bilik suara langsung mencoblos ketiga kandidat”

Sedangkan untuk pemilih yang tidak melaksanakan haknya dalam Pilgub Jawa Barat sejumlah 33,11% atau sejumlah 9.247.977 orang pemilih. Angka yang tidak menggunakan haknya ini lebih besar dari perolehan suara pasangan terpilih H. Ahmad Heryawan dan H. Dede Yusuf sejumlah 7.287.647. hal ini

<sup>12</sup> Wawancara dilaksanakan di kantor Kecamatan Cobleng hari Rabu 17 Februari 2010 pukul 10.30 Wib

<sup>13</sup> Ibid 13

<sup>14</sup> Wawancara dilaksanakan di kantor KPU Jawa Barat hari Sabtu 6 Februari 2010 pukul 09.30 Wib

<sup>15</sup> Ibid 12

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kurang antusias terhadap pilgub tersebut.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, bahwa secara garis besar golput yang terjadi di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kecamatan Cobleng merupakan golput yang bersifat administratif. Hal ini terbukti dengan adanya surat suara tidak sah yang cukup banyak dan adanya beberapa pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap serta masih adanya data terdahulu seperti orang yang sudah meninggal masih terdaftar.

Berikut adalah data Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jawa Barat untuk Kecamatan Cobleng.

**Tabel 2**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jawa Barat untuk Kecamatan Cobleng**

No	Nama Pasangan	Jumlah Perolehan
1	Da'i (Danny Setiawan dan Iwan Ridwan Sulandjana) diusung Partai Golkar dan Demokrat.	11.807
2	Aman (Agum Gumelar dan Nu'man Abdul hakim) diusung Partai PDIP dan PPP.	17.478
3	Hade (Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf) diusung Partai PKS dan PAN.	25.610
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan		54.895
Jumlah perolehan suara tidak sah untuk seluruh pasangan		1800

**Sumber: Rekapitulasi Pilgub Kecamatan Cobleng, 2008.**

Data di atas menunjukkan bahwa golput yang didefinisikan dari surat suara yang tidak sah di Kecamatan Cobleng sebesar 1800 pemilih. Artinya adanya surat suara yang tidak sah tersebut menunjukkan masih terdapat golput yang cukup signifikan.

Menurut Penulis, alasan di atas dikaitkan dengan kasus di Kecamatan Cobleng lebih mengacu pada alasan individual atau teknis. Hal ini bisa dilihat karena pada saat hari pemilihan diliburkan, sehingga memungkinkan pemilih tidak berada di tempat atau dengan kata lain bepergian ke luar kota. Selain itu juga termasuk alasan politis. Masyarakat Cobleng

terutama kalangan pedagang menganggap bahwa mereka merasa tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pilgub akan membawa perubahan dan perbaikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Secara garis besar, dari catatan hasil pemantauan dalam Pilgub Jawa Barat dan hasil interview dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat<sup>16</sup> bahwa pemilih yang tidak menggunakan suaranya disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain :

- (1) Pemilih berada di luar Provinsi Jawa Barat/Kabupaten/Kota karena bekerja atau sekolah.
- (2) Pemilih bepergian ke luar Provinsi Jawa Barat/Kabupaten/Kota untuk suatu keperluan.
- (3) Pemilih sedang sakit/meninggal dunia.
- (4) Pemilih berada di tempat tinggal tetapi tidak hadir ke TPS.
- (5) Pemilih tidak yakin bahwa pasangan calon yang terpilih dapat memperbaiki kesulitan masyarakat Jawa Barat.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan ketua PPK Kecamatan Cobleng<sup>17</sup> dan Sekretaris Panwas Pilgub<sup>18</sup> bahwa sikap golput di Cobleng dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

*Pertama*, tidak puas terhadap para kandidat kepala daerah yang akan dipilih. Artinya para kandidat bukan berasal dari putra daerah melainkan mereka berasal dari luar sehingga para pemilih kurang mengenal kandidat. *Kedua*, masyarakat sudah apatis. Seperti di Kecamatan Cobleng, saat peneliti memberikan pertanyaan kepada Ketua PPK dan beberapa para pedagang<sup>19</sup>, bahwa menurut

<sup>16</sup> Wawancara dilaksanakan di kantor KPU Jawa Barat hari Sabtu 6 Februari 2010 pukul 09.30 Wib

<sup>17</sup> Wawancara dilaksanakan di kediaman rumah Ketua PPK Kecamatan Cobleng hari Kamis 11 Februari 2010 pukul 13.30 Wib

<sup>18</sup> Wawancara dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cobleng hari Kamis 18 Februari 2010 pukul 11.30 Wib

<sup>19</sup> Wawancara dilaksanakan di daerah Dipati Ukur hari Jum'at 12 Februari 2010 pukul 09.15 Wib

mereka lebih menguntungkan untuk berdagang dibanding ke TPS (tempat pemungutan suara).

Faktor *ketiga* adalah kurang maksimalnya sosialisasi Pilgub Jawa Barat. Hal ini sesuai yang peneliti dapatkan berdasarkan data laporan pelaksanaan hasil Pilgub Jawa Barat dari KPU. Hambatan sosialisasi ini adalah akibat dari tahapan yang baru dapat dijalankan pada bulan Januari 2008 yang seyogyanya harus dimulai pada bulan Oktober 2007.

### 5. Simpulan dan Saran

Simpulan dari pembahasan di atas, menurut Penulis antara lain :

- 1) Kelompok Golput di Kecamatan Coblong dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008 adalah para pendatang seperti mahasiswa dan para pedagang.
- 2) Makna Golput di Kecamatan Coblong dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008 adalah sekelompok orang-orang yang tidak memberikan aspirasi kepada siapapun terhadap ketiga kandidat dalam Pilgub Jawa Barat.
- 3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perilaku Pemilih Golput di Kecamatan Coblong dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat Tahun 2008 antara lain:
  - (a) Sikap apatis yaitu tidak cocok dengan pasangan calon yang ada, alasannya karena bukan putera daerah melainkan dari daerah lain dan merupakan pilihan partai.
  - (b) Tidak percaya terhadap pemerintahan, karena tidak akan memperhatikan dan memperbaiki kebutuhan sehari-hari dari pemilih.
  - (c) Kurangnya sosialisai Pilgub dari KPU Jawa Barat.

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan adalah :

- 1) Partai politik seharusnya bisa memberikan pendidikan politik kepada rakyat pemilih

untuk menggunakan hak pilihnya melalui diskusi-diskusi atau penyuluhan-penyuluhan tentang arti pentingnya suatu pemilihan.

- 2) KPU Provinsi Jawa Barat seharusnya dapat mensosialisasikan Pilgub Jawa Barat lebih lama lagi sebelum menjelang pelaksanaan Pilgub, khususnya dalam proses dan tahapan pilgub supaya lebih mendorong pemilih untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan.
- 3) Biaya Pilgub Jawa Barat sangat mahal, seharusnya dipersiapkan dan dimatangkan kembali dari awal proses sosialisasi, pelaksanaan pilgub sampai dengan evaluasi, supaya dana tersebut tidak terkesan dihambur-hamburkan.
- 4) Untuk menarik pemilih datang ke TPS, sebaiknya panitia pemilihan memberikan undian *doorprice* atau di TPS diadakan acara organ tunggal, dangdutan dan lain-lain, seperti yang dilaksanakan di daerah Jawa Tengah.

### Daftar Pustaka

- Afifi, Subhan, dkk. 2005. *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : FISIP UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Ari, Pradhanawati, (Penyunting). 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta : KOMPIP.
- Almond, Gabriel A, and G. Bingham Powel, Jr. 1986. *An Analitic Study Comparative Politics A Developmental Approach*. Boston: Little Brown and Company.
- Asfar, Muhammad. 1996. *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih*. Jakarta : Jurnal Ilmu Politik.
- Bone, Hugh A , Austin Ranney. 1981. *Politics and Voters*. New York : Mc Graw-Hill Book Company.

- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Imawan, Riswandha. 1993. *Analisis Hasil Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*. Laporan Penelitian. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Kavanagh, Dennis. 1983. *Political Science and Political Behavior*. London: George Allen & Unwim. Hal.83-84.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yin, Robert. 1994. *Case Study Research: Design and Method, second edition, Applied Social Research Methods Series Volume 5*. Sage Publications, London, hal 13.
- [3/dpt-dantps-pilgub-jabar-2008-disahkan.html](http://3/dpt-dantps-pilgub-jabar-2008-disahkan.html). {10/12/2009}.

**Artikel/Jurnal :**

Fokus. 2008. *Fenomena Golput*. Artikel dalam Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie Membangun Kesadaran Umat. No. 97 Tahun IX,1-30 September.

Jurnal nasional dalam Bandung New. DPT dan TPS Pilgub Jabar 2008 Disahkan Tanggal 1 Maret 2008. Melalui <http://argusbandung.blogspot.com/2008/0>

